

---

**DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK :  
STUDI KASUS PEMEKARAN KECAMATAN KRANGGAN  
KOTA MOJOKERTO**

**Rosaria Nikasari**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga  
*rosarianikasari@gmail.com*

***Abstract***

*This study aims to describe impact of Kranggan Sub-District of Mojokerto City's proliferation against public services. This research is motivated by one of the crucial part in regional development such as huge number of population, growth population increased and the economic growth rate also the increasing demand of public services to meet the needs of the society.*

*The Regional Proliferation is a process of dividing an existing administrative region (autonomy region) into two or more new autonomy region. Sub-district Proliferation is the formation of new sub-district that aims to improve the quality of public services in order to accelerate the realization of community welfare. While, public service is an activity conducted by local and central government in order to meet the needs of services of society. This study employs qualitative descriptive method. The data were collected through observation, documentation study, in-depth interview, the determination of informants was done by purposive and snowball sampling where the parties were considered to know the impacts of th sub-district proliferation.*

*The result shows that Kranggan Sub-district Proliferation brought positive impact on the public services in Kranggan Sub-District of Mojokerto City, the application of SOP becomes more firmly after the sub-district proliferation, also the society mileage becomes closer, and the queue becomes shorter so that the services are more effective and efficient. The quality of public services in sub-district post-proliferation is greatly improved. Also, the current society feel more cared for because the sub-district work area has been reduced so that the burden of sub-district services also decreased.*

***Keywords : Regional Proliferation, Sub-district, Impact, and Public Services***

---

**PENDAHULUAN**

Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan perkataan lain, hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan daerah otonom baru, sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Kaitanya dengan pengembangan wilayah, sekarang ini telah dibentuk suatu program pemerintah tentang pembangunan wilayah yang

disebut pemekaran. Program ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan saat ini direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014, yang menerangkan adanya peranan masyarakat lokal dalam mengelolah berbagai potensi untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dan majunya suatu daerah baik itu di sektor Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan keamanan pemekaran daerah adalah salah satu jalan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sangat tergantung kepada manajemen birokrasi pemerintahan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam di suatu daerah.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang pemekaran daerah dijelaskan pula tentang tata cara pembentukan

wilayah, penggabungan serta penghapusan suatu wilayah namun tidak dijelaskan tentang berapa besar indikator jumlah penduduk yang harus dipenuhi oleh sebuah wilayah untuk melakukan sebuah pemekaran. Dalam Peraturan Pemerintah lebih ditekankan kepada pemanfaatan potensi-potensi yang ada di daerah pemekaran agar dapat di manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan pembagunan serta pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Program pemekaran kecamatan pula memiliki maksud yang lebih besar yakni dengan program pemekaran kecamatan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sesuai dengan harapan serta tujuan dari pemekaran tersebut. Pembangunan merupakan permasalahan pokok bagi masyarakat bangsa-bangsa berkembang. Pembangunan berkenaan dengan kebebasan dan kemampuan bangsa, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terentaskanya kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan, politik demokratis, kesetaraan jender, kemajuan iptek, dan inovasi, keamanan (security), serta berkelanjutan lingkungan merupakan parameter-parameter penting pembangunan, yang makin menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia. Pembangunan kecamatan ini lebih mengarah pada ketersediaan infrastruktur serta percepatan pelayanan publik kepada masyarakat oleh pemerintah.

Kota Mojokerto merupakan kota Penyangga utama Ibu kota Provinsi Jawa timur. Kota ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dilihat dari penerimaan asli daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Kota Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila. sekarang ini ada Tol Surabaya-Mojokerto dengan adanya Tol tersebut maka Perkembangan Kota Mojokerto semakin mengalami Perkembangan yang sangat pesat.

**Tabel I.1**  
**Perbandingan Luas Wilayah, Jumlah**  
**Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Provinsi**  
**Jawa Timur Tahun 2015**

<b>Kabupaten Kota</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km<sup>2</sup>)</b>
<b>Kabupaten</b>			
Pacitan	1.342	550.986	410
Ponorogo	1.372	867.393	632
Trenggalek	1.205	689.200	572
Tulungagung	1.046	1.021.190	976
Blitar	1.589	1.145.396	721
Kediri	1.386	1.546.883	1.116
Malang	2.979	2.544.315	854
Lumajang	1.791	1.030.193	575
Jember	2.478	2.407.115	972
Banyuwangi	5.783	1.594.083	276
Bondowoso	1.560	761.205	488
Situbondo	1.639	669.713	409
Probolinggo	1.599	1.140.480	713
Pasuruan	1.151	1.581.787	1.275
Sidoarjo	634	2.117.279	3.338
Mojokerto	692	1.080.389	1.561
Jombang	904	1.240.985	1.373
Nganjuk	1.224	1.041.716	851
Madiun	1.011	676.087	669
Magetan	689	627.413	911
Ngawi	1.296	828.783	640
Bojonegoro	2.307	1.236.607	536
Tuban	1.840	1.152.915	627
Lamongan	1.670	1.187.795	711
Gresik	1.191	1.256.313	1.055
Bangkalan	1.260	954.305	758
Sampang	1.233	936.801	760
Pamekasan	729	845.314	1.067
Sumenep	1.999	1.072.113	536
<b>Kota</b>			
Kediri	63	280.0004	4.416
Blitar	33	137.908	4.234
Malang	110	851.298	7.735
Probolinggo	57	229.013	4.042
Pasuruan	35	194.815	5.520
Mojokerto	16	125.706	7.637
Madiun	33	174.995	5.266
Surabaya	326	2.848.583	8.728
Batu	93	200.485	2.161
<b>Jawa Timur</b>	<b>46.429</b>	<b>38.847.561</b>	<b>837</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2016 (Data Diolah)

Tabel I.1 menyajikan data luas wilayah, penduduk akhir tahun 2015, tingkat kepadatan penduduk, serta rasio jenis kelamin yang digambarkan menurut kabupaten/kota se Jawa Timur. Di Jawa Timur, daerah yang memiliki

wilayah paling luas adalah Kabupaten Banyuwangi (5.782,68 km<sup>2</sup>) atau sebesar 12,46% dari seluruh luas wilayah Jawa Timur. Selanjutnya adalah Kabupaten Malang dengan luas wilayah 2.979,41 km<sup>2</sup> (6,62%); dan Kabupaten Jember dengan luas 2.477,68 km<sup>2</sup> (5,34%). Sedang Kota Mojokerto merupakan wilayah yang mempunyai luas terkecil di Jawa Timur yaitu 16,46 km<sup>2</sup> (0,03%).

Apabila dilihat dari kepadatan penduduk, Kota Mojokerto menempati urutan ketiga setelah Kota Surabaya dan Kota Malang. Tingkat kepadatan penduduk Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Mojokerto masing-masing sebesar 8.647, 7.639 dan 7.521 jiwa per km<sup>2</sup>; dari wilayah yang relatif kecil masing-masing seluas 326,36; 110,06 dan 16,46 km<sup>2</sup>. Dari kepadatan penduduk ini bisa dilihat bahwa ketiga kota ini menjadi tujuan utama arus urbanisasi. Hal ini dimungkinkan oleh para pencari kerja maupun penduduk yang ingin bersekolah di tempat yang mereka anggap lebih bagus dibandingkan dengan daerah asal mereka.

**Tabel I.2**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Mojokerto**

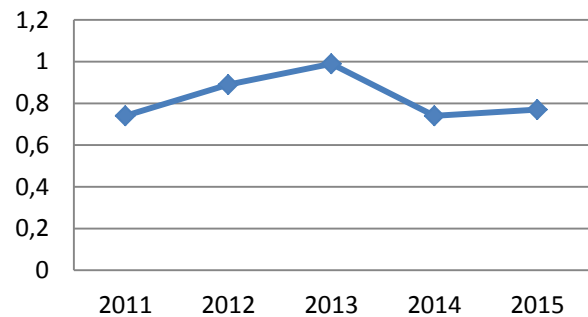
Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
2011	120.064	7.294
2012	134.222	8.154
2013	135.024	8.203
2014	139.677	8.486
2015	139.628	8.482

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2016 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel I.2, besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto dengan luas wilayah yang sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi sangat tinggi, yaitu 8.486 penduduk per kilometer persegi (km<sup>2</sup>) di tahun 2014 dan sebesar 8.293 penduduk per kilometer persegi (km<sup>2</sup>) di tahun 2013. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, perkembangan penduduk Kota Mojokerto memiliki pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2014 pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto mengalami kenaikan sebesar 2,33 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Kenaikan laju pertumbuhan penduduk ini disinyalir terkait dengan perpindahan penduduk dari luar Kota

Mojokerto yang meningkat serta meningkatnya angka kelahiran.

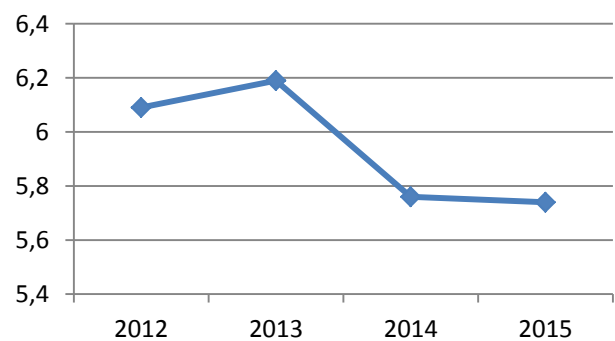
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto**



Gambar I.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto  
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2016 (Data Diolah)

Berdasarkan data gambar I.1, maka terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto pada Tahun 2011 sebesar 0,74%, tahun 2012 sebesar 0,89%, tahun 2013 sebesar 0,99 %, tahun 2014 0,74 %, dan pada tahun 2015 adalah sebesar 0,77 %. Pertumbuhan penduduk sebesar itu sebenarnya termasuk pertumbuhan yang tinggi, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2014, namun pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto.

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto**



Gambar I.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto tahun 2016 (Data Diolah)

Berdasarkan gambar I.2, maka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada Tahun 2012 sebesar 6,09%, tahun 2013 sebesar 6,19 %, tahun 2014 5,76 %, dan pada tahun 2015 adalah sebesar 5,74 %. Pertumbuhan ekonomi sebesar itu sebenarnya termasuk pertumbuhan yang tinggi, mengingat beberapa tahun sebelumnya perekonomian Kota Mojokerto

cenderung labil sebagai dampak dari terjadinya krisis ekonomi.

Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto serta perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Mojokerto yang cukup tinggi menuntut pemerintah Kota Mojokerto untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Upaya peningkatan pelayanan publik salah satunya melalui pemekaran wilayah kecamatan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Kota Mojokerto 2014-2019 yaitu “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai *Service City* yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Bermoral.”

Kecamatan Kranggan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan. Pemekaran Kecamatan Kranggan merupakan pemekaran kecamatan pertama di Kota Mojokerto, yang sebelumnya di Kota Mojokerto hanya terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajurit Kulon. Pemekaran Kecamatan Kranggan bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi Kecamatan Kranggan adalah salah satu Lembaga Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kota Mojokerto. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam pasal 50 menyebutkan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Kranggan sebelumnya merupakan kelurahan yang ada di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Perjurit Kulon. Sebelum pemekaran kecamatan, Kelurahan Miji dan Kelurahan Kranggan tersebut merupakan bagian dari Kecamatan Kranggan. Sedangkan Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, dan Kelurahan Meri merupakan bagian dari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

Dari penjelasan di atas, maka penelitian ini difokuskan di atas tentang dampak pemekaran wilayah kecamatan terhadap pelayanan publik. Melihat pemekaran wilayah kecamatan ini mengakibatkan beberapa dampak dan perubahan pelayanan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto terhadap pelayanan publik?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto terhadap pelayanan publik.

Manfaat penelitian ini adalah secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian perencanaan pembangunan dan pemekaran wilayah. Dan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan untuk Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dalam pemekaran Kecamatan Kranggan untuk meningkatkan pelayanan publik serta Pemerintah Kota Mojokerto melalui peningkatan pelayanan publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode observasi, studi dokumen dan wawancara secara mendalam, penentuan informan dilakukan dengan *purposive* dan *snowball sampling* dimana pihak-pihak dianggap mengetahui dampak-dampak pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Analisis data menggunakan analisis kualitatif merujuk pada Sugiyono dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

## PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN

Harmantyo (2007: 16) mengemukakan bahwa pemekaran adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru. Tarigan (2010: 23) mengemukakan bahwa pemekaran merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu daerah menjadi dua atau beberapa daerah.<sup>1</sup>

Menurut UU No.24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, wilayah adalah ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

<sup>1</sup> Putri, Raras Efrianti. 2016. *Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Skripsi. Tidak diterbitkan

Blair (1991) dalam Nugroho (2003) menyebutkan bahwa dalam menganalisis wilayah dikenal 3 tipe,<sup>2</sup> yakni :

1. Wilayah fungsional, yaitu adanya saling interaksi antara komponen-komponen didalam dan diluar wilayahnya. Wujud wilayah sering disebut wilayah nodal yang didasari oleh susunan dari suatu hubungan di antara simpul-simpul perdagangan.
2. Wilayah homogen, artinya adanya relatif kemiripan dalam suatu wilayah.
3. Wilayah administratif, artinya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Sementara itu, tujuan wilayah menurut Sihotang adalah sebagai suatu usaha untuk menentukan batas-batas daerah yang biasanya lebih besar daripada daerah struktur pemerintahan lokal, dengan maksud lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah beserta perencanaan lokal dan nasionalnya.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan dan Kelurahan adalah merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Kecamatan adalah satu organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah dancara untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Definisi pemekaran kecamatan menurut Wasistiono bahwa pemekaran kecamatan dibentuk berdasarkan pada perimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial, budaya, dan pertimbangan lain yang memungkinkan mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Pembentukan nama, batas dan

ibu kota kecamatan yang dimekarkan diatur dengan peraturan daerah.<sup>4</sup>

Pemekaran kecamatan berarti terbentuknya kecamatan baru, kecamatan baru tersebut merupakan salah satu dari organisasi atau perangkat daerah yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan pemekaran wilayah terdapat tujuan pembangunan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

#### **DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK**

Dampak adalah suatu akibat yang dihasilkan dari pengimplementasian sebuah kebijakan atau program. Dampak dari sebuah kebijakan atau program terdapat pada bagian evaluasi yang menempati posisi terakhir dalam alur proses kebijakan publik, setelah formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan atau program.

Dampak juga merupakan akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada sekelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan) dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku pada kelompok sasaran (*impact*). Selain itu dampak juga dapat diartikan sebagai akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dan apakah akibat tersebut mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran.

Pengukuran dan penilaian dampak dari suatu program perlu dilakukan guna mengukur pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan, hal ini juga berguna dalam memberikan umpan balik berupa kontribusi/rekomendasi dalam pembuatan keputusan

<sup>2</sup> Nugroho, I. 2003. *Pembangunan Wilayah Jakarta*. Jakarta : LP3ES. Hal: 76

<sup>3</sup> Sitohang, P. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta: Penerbit UI Press. Hal : 34

<sup>4</sup> Wasistiono, Sadu dkk. 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan*. Bandung: Citra Pindo, hal. 14

<sup>5</sup> Tri, Ratnawati. 2009. *Pemekaran Daerah*. Jakarta: pustaka Pelajar. Hal. 23

program dan perbaikan program dimasa yang akan datang.

Menurut Ernest R. Alexander, metode evaluasi dapat di klarifikasikan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudah program di laksanakan.
2. *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi ada(*actual*) dengan ketetapan perencanaan (*planned*).
3. *Experental (controlled) models*, metode mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang di teliti.
4. *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang di teliti.
5. *Cost oriental models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana .

Pada dasarnya dampak dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan efektifitas sebuah kebijakan/ program terhadap permasalahan yang diangkat. Tujuan dari evaluasi dampak adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Menilai apakah program telah memberikan hasil yang diinginkan oleh masyarakat
2. Menilai apakah hasil tersebut berkaitan dengan intervensi program
3. Mengeksplor apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun yang negatif
4. Mengkaji bagaimana suatu program dapat mempengaruhi kelompok sasaran, dan apakah perubahan yang terjadi di dalam kelompok sasaran merupakan akibat dari program tersebut atau faktor yang lainnya.

<sup>6</sup> Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: PT. Revka Petra Media. Hal: 279

Secara garis besar tujuan dilakukannya penilaian dampak menurut Parsons adalah untuk menunjukkan bagaimana suatu program atau kebijakan sudah berjalan sesuai tujuan awal atau sebaliknya, memenuhi tujuan kebijakan/ program serta menjaga kontruksi problem dan klaim kebijakan yang diajukan oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Penilaian dampak yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan salah satu teori yang dikemukakan oleh Ernest R. Alexander yakni *before and after comparisons*.

Dari keterangan diatas maka dirumuskan bahwa dampak merupakan hasil dari pengimplementasian dari sebuah kebijakan atau program yang dapat dilihat dari perubahan yang terjadi setelah adanya program atau kebijakan baik perubahan fisik maupun perubahan secara sosial.

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri.<sup>8</sup> Daerah atau wilayah pemekaran adalah suatu daerah atau wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Pemekaran kecamatan berarti terbentuknya kecamatan baru, kecamatan baru tersebut merupakan salah satu dari organisasi atau perangkat daerah yang memiliki tujuan-tujuan tertentu . Tujuan utama dari pemekaran wilayah ialah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional.

Menurut Moenir Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau

<sup>7</sup> Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana

<sup>8</sup> Poerwadarminta. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka

sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Lebih lanjut Thoha mengatakan, secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*).

Sementara menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses kegiatan yang menjadi tugas pokok atau tanggung jawab para aparatur pemerintah negara ataupun daerah guna memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat baik berupa pelayanan administratif ataupun pelayanan jasa demi tercapainya tujuan negara yakni kesejahteraan masyarakatnya.

Parasuraman dalam Lijan berpendapat bahwa terdapat lima indikator pelayanan publik<sup>10</sup>, yaitu :

1. *Reliability*, merupakan kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan secara handal dan akurat. Hal ini merujuk pada konsistensi penyelenggaraan layanan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Kepastian dalam layanan merupakan sebuah keharusan, sebab pada sisi lain inilah akan dibangun rasa kepercayaan antara pengguna layanan dengan organisasi penyedia layanan. Oleh

karenanya konsistensi pelayanan merupakan sebuah kondisi yang hendaknya hadir dalam setiap penyelenggaraan pelayanan.

2. *Responsiveness*, merupakan kesediaan untuk membantu pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan tepat waktu. Hal ini merujuk pada ketanggapan dari petugas pelayanan dalam meningkatkan rasa kenyamanan pengguna layanan. Meskipun organisasi publik tidak menghadapi masalah dengan kekhawatiran akan kehilangan pelanggan akan tetapi dalam negara demokrasi masyarakat adalah fokus perhatian dari penyelenggaraan pemerintahan.
3. *Assurance*, merupakan pengetahuan dan keramahan petugas pemberi layanan serta kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna layanan. Aspek ini merupakan salah satu yang paling diharapkan oleh pengguna layanan. Petugas yang ramah akan menjadi salah satu faktor determinan bagi pengguna layanan untuk memberikan penilaian yang baik atas pelayanan yang telah diberikan. Kemudian kepercayaan diri pengguna layanan juga akan meningkat manakala petugas layanan tidak saja mampu menjelaskan prosedur layanan melainkan filosofi dari aturan prosedur tersebut. Hal yang paling penting adalah cara penyampaian pendapat atau penjelasan yang disampaikan petugas layanan. Semakin ramah dan sopan penyampaian penjelasan atau pendapat petugas pelayanan maka akan semakin baik penerimaan pengguna layanan yang disajikan.
4. *Empathy* (perhatian), didefinisikan sebagai respon afektif dan kognitif yang kompleks pada distres emosional orang lain. Empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah, dan mengambil perspektif orang lain.

<sup>9</sup> Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 16

<sup>10</sup> Lijan, Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 7

5. *Tangibles* (bukti fisik), adalah fasilitas fisik, perlengkapan dan penampilan petugas pelayanan. Aspek ini berkaitan dengan hal-hal yang terlihat dalam pelayanan seperti fasilitas ruang tunggu, sistem komputerisasi yang berjaring sehingga memudahkan alur informasi dan lain sebagainya. Tentunya semakin baik bekerjanya alat-alat tersebut akan dapat diandalkan menurut persepsi pengguna layanan maka akan mempengaruhi penilaian terhadap kualitas pelayanan.

Pelayanan publik yang diselenggarakan di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto ialah sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan
  - a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala mikro perorangan
  - b. Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala mikro perorangan
2. Pelayanan Non Perizinan
  - a. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Akte Kelahiran
  - c. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Akte Kematian
  - d. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Pindah
  - e. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Pindah Antar Kecamatan
  - f. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Pensiun
  - g. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Pendaftaran TNI, Polri, dan sejenisnya
  - h. Penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha
  - i. Rekomendasi Pelayanan Administrasi permohonan IMB dan HO
  - j. Pelayanan non perizinan lain yang dimohonkan oleh masyarakat

#### Dampak Pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto terhadap Pelayanan Perizinan

Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran
Pelayanan perizinan yang diberikan masih cenderung lama, dalam pengurusan perizinan bisa memerlukan waktu sehari. Dan juga, beban pelayanan publik cukup banyak sehingga menyebabkan antrian yang cukup panjang.	Proses dan prosedur pelayanan perizinan masih sama. Namun, penerapan SOP semakin tegas. Serta, Pelayanan perizinan yang diberikan semakin cepat. Dalam pengurusan perizinan saat ini, hanya memerlukan waktu $\pm 15$ menit. Dan juga, Beban pelayanan kecamatan semakin berkurang. Hal ini mengakibatkan, sudah tidak adanya antrian yang terlalu panjang. Sehingga pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien

#### Dampak Pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto terhadap Pelayanan Non Perizinan

Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran
Pada pelayanan non perizinaan, antrian untuk mendapatkan pelayanan cukup panjang serta beban pelayanan di kecamatan cukup banyak.	Proses dan prosedur pelayanan non-perizinan masih sama. Namun, penerapan SOP pelayanan semakin tegas. Pelayanan publik pasca pemekaran yang dilakukan menjadi lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh sudah tidak adanya antrian yang terlalu panjang serta beban pelayanan kecamatan berkurang, dari yang awalnya menangani 10 dan 8 kelurahan, setelah pemekaran masing-masing menangani 6 kelurahan. Sehingga, pelayanan non perizinan yang diberikan oleh Kecamatan menjadi lebih efektif dan efisien.



**Dampak Pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto terhadap Kualitas Pelayanan Publik**

Aspek	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran
<i>Reliability</i>	Pelayanan yang diberikan oleh kecamatan lama sudah dapat diandalkan, namun karena beban kerja pemerintah kecamatan sebelumnya terlalu banyak maka pelayanan yang diberikan kurang maksimal.	Pelayanan publik yang diberikan sangat bisa diandalkan. Selain itu juga petugas pemberi pelayanan sudah mampu dan handal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pihak Kecamatan Kranggan sudah dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin maksimal.
<i>Responsive ness</i>	Pelayanan publik yang diberikan oleh pihak kecamatan sebelumnya masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan antrian masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sangat banyak, selain itu juga beban kerja pemerintah kecamatan sebelumnya sangat besar.	Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat pasca pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto sangat baik. Hal ini dikarenakan petugas pemberi layanan mampu menyelesaikan keluhan masyarakat dengan tepat dan cepat. Beban pelayanan kecamatan sudah berkurang sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan maksimal.
<i>Assurance</i>	Pelayanan yang diberikan oleh kecamatan lama sudah baik, masyarakat sudah. Petugas sudah mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik.	Keramahan dan kesopanan petugas Kecamatan Kranggan dalam memberikan pelayanan publik sangat baik. Selain itu juga petugas juga memiliki kemampuan dan keahlian dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini mampu membentuk kepercayaan warga masyarakat.

<i>Emphaty</i>	Dikarenakan beban pelayanan yang cukup banyak, perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada masyarakat belum maksimal. Namun pelayanan yang diberikan sudah cukup baik.	Perhatian dan kepedulian petugas kecamatan Kranggan dalam membelikan pelayanan dinilai baik. Hal ini dikarenakan petugas memiliki kemampuan dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang kesulitan dalam memahami prosedur. Sehingga warga tidak mengalami kebingungan.
<i>Tangibles</i>	Sarana dan prasarana fisik sudah sangat memadai dan lengkap sehingga dapat memudahkan pelayanan publik yang diberikan.	Sarana dan prasarana fisik Kecamatan Kranggan pasca pemekaran dinilai masih kurang, dikarenakan masih dalam proses pembangunan. Namun, hal tersebut tidak mengganggu proses pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

**KESIMPULAN**

Pemekaran wilayah Kecamatan Kranggan membawa dampak positif bagi pelayanan publik di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, yaitu setelah pemekaran wilayah kecamatan penerapan SOP menjadi lebih tegas dan berkurangnya antrian sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat. Kualitas pelayanan publik di kecamatan pasca pemekaran sangat meningkat. Dikerankan dengan adanya pemekaran kecamatan ini, jarak tempuh masyarakat menjadi lebih dekat serta antrian yang tidak terlalu panjang. Selain itu juga, pelayanan yang diberikan oleh pihak kecamatan menjadi lebih efektif dan efisien. Serta masyarakat saat ini merasa lebih diperhatikan, karena wilayah kerja kecamatan sudah berkurang sehingga beban pelayanan kecamatan juga menurun. Dampak pemekaran wilayah kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Dampak Pemekaran terhadap Pelayanan Perizinan

Pemekaran wilayah kecamatan Kranggan memberikan dampak positif

pada pelayanan perizinan yang diberikan oleh pihak kecamatan kepada warga masyarakat, yaitu setelah pemekaran wilayah kecamatan penerapan SOP menjadi lebih tegas dan berkurangnya antrian sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat. Kualitas pelayanan pelayanan perizinan di kecamatan pasca pemekaran sangat meningkat. Dikerankan dengan adanya pemekaran kecamatan ini, jarak tempuh masyarakat menjadi lebih dekat. Serta masyarakat saat ini merasa lebih diperhatikan, karena wilayah kerja kecamatan sudah berkurang sehingga beban pelayanan kecamatan juga menurun.

b. Dampak Pemekaran terhadap Pelayanan Non Perizinan

Sama halnya dengan pelayanan perizinan. Pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto memberikan dampak positif terhadap pelayanan non perizinan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu setelah pemekaran wilayah kecamatan penerapan SOP menjadi lebih tegas dan berkurangnya antrian sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat. Kualitas pelayanan publik di kecamatan pasca pemekaran sangat meningkat. Dikerankan dengan adanya pemekaran kecamatan ini berdampak pada berkurangnya beban pelayanan kecamatan dari yang sebelumnya menangani 10 kelurahan dan 8 kelurahan sekarang masing-masing menangani 6 kelurahan. Dengan berkurangnya beban pelayanan di kecamatan, maka pelayanan yang diberikan semakin cepat sehingga masyarakat saat ini merasa lebih diperhatikan. Setelah pemekaran pelayanan non perizinan yang diberikan oleh Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto menjadi lebih efektif dan efisien.

c. Dampak Pemekaran terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pihak Kecamatan Kranggan meningkat. Hal ini dapat dilihat pada indikator-indikator berikut:

1. *Reliability*; Pelayanan yang diberikan pegawai Kecamatan Kranggan Kota

Mojokerto sudah reliabel, dimana dalam memberikan pelayanan petugas kecamatan sudah mampu dan handal dalam melayani masyarakat. Petugas kecamatan Kranggan juga sudah sangat memahami SOP yang telah ditetapkan, sehingga hal itu sangat memudahkan dan mempercepat dalam pemberian pelayanan publik. Selain itu juga, pihak kecamatan sudah memiliki tugas pokok fungsi masing-masing sehingga pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih terpercaya dan akurat.

2. *Responsiveness*; respons petugas kecamatan sudah bisa dikatakan sangat baik. Karena petugas mampu mengatasi keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Selain itu juga, ketepatan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari lama waktu yang penyelesaian pelayanan yang sudah selesai dengan yang telah dijanjikan.
3. *Assurance*; meliputi sikap yang ramah dan terjaminnya kemampuan petugas pelayanan dalam menyelesaikan tugasnya. Pegawai Kecamatan Kranggan dinilai ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Serta, kemampuan dan keahlian petugas dinilai mampu untuk mengatasi keluhan yang disampaikan oleh warga. Aspek-aspek tersebut lalu membentuk kepercayaan warga masyarakat atas kemampuan petugas kecamatan dalam memberikan pelayanan.
4. *Empathy*; kemampuan petugas Kecamatan Kranggan dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang kesulitan memahami prosedur dalam memperoleh pelayanan sudah baik. Pegawai kecamatan dinilai sudah mempunyai kepedulian terhadap warga, hal ini tercermin dari bentuk perhatian ketika memberikan pelayanan sehingga masyarakat tidak kebingungan saat akan melakukan proses pelayanan.
5. *Tangibles*; meliputi sarana dan prasarana fisik Kecamatan Kranggan pasca pemekaran. Dalam hal ini,

dinilai masih kurang, karena beberapa sarana masih akan dibangun tahun depan dan juga untuk gedung Kecamatan Kranggan saat ini masih pinjam. Namun dari hasil penelitian, meskipun sarana dan prasarana masih kurang lengkap, hal itu tidak mengganggu pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agung, Muliawan. 2016. *Pengaruh Pemekaran terhadap Kualita Pelayanan Publik di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*. Makassar: Universitas Hasaniddin. Skripsi. Tidak Diterbitkan.
- Andi, Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Burhan, Bungin. 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, W John. 2016. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djohan, Djohermansyah. 1990. *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harmantyo, J. 2007. *Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan. Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia*. Makara Sains. Vol. 11, No. 1, April 2007: 16-22. Depok. Departemen Geografi, FMIPA, Universitas Indonesia.
- Hasrani. 2016. *Studi Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali*. Kendari: Universtas Halu Oleo. Skripsi. Tidak Diterbitkan.
- Imro'atin, Elida Nur Laily. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat Desa Sugio Dalam Pembangunan Perluasan Pasar Desa Di Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)*. Surabaya : Universitas Airlangga. Skripsi. Tidak Diterbitkan.
- Lantara, Lifia Anis. 2016. *Pengaruh Pemekaran Kecamatan terhadap Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara*. Makassar: Univesitas Hasanudin. Skripsi. Tidak Diterbitkan.
- Makagansa. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: FusPad
- Miles, Mathew J dan A. Micheal Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Bar*. Jakarta: UI Press.
- Moenir. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, I. 2003. *Pembangunan Wilayah Jakarta*. Jakarta : LP3ES
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Poerwadarminta. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putri, Raras Efrianti. 2016. *Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Skripsi. Tidak diterbitkan
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitohang, P. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, Tjahya. 2003. *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Nimas Multima.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Tarigan, Robinson. 2009. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Thoah, Miftah. 1995. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.

---

UNDP. 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah*. Jakarta: Building and Reinventing Decentralised Governance

Wasistiono, Sadu. 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan*. Bandung: Citra Pindo.

Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia Publishing

<http://ymayowan.lecture.ub.ac.id/2012/01/pemekaran-kecamatan-di-kabupaten-bojonegoro/> diakses pada 23 Juni 2017 pukul 21.47

<http://mojokertokota.go.id> diakses pada 16 Juni 2017 pukul 22.45

**Dokumen :**

Kecamatan Magersari dalam Angka 2016

Kecamatan Prajurit Kulon dalam Angka 2016

Kota Mojokerto dalam Angka tahun 2015

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan

Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 17 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan

Peraturan Pemerintah Nomer 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 117 Tahun 2016 tentang standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Mojokerto

Statistik Daerah Kecamatan Magersari 2016

Statistik Daerah Kecamatan Prajurit Kulon 2016

Statistik Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

**Internet :**

<https://www.bangsaonline.com/berita/10139/pemekaran-wilayah-di-kota-mojokerto-untuk-mewujudkan-service-city> diakses pada 7 Mei 2017 pukul 23.34

[http:// digilib.unila.ac.id/6409/](http://digilib.unila.ac.id/6409/) diakses pada 17 Mei 2017 00.47

[http:// digilib.unila.ac.id/27183/](http://digilib.unila.ac.id/27183/) diakses pada 17 Mei 2017 pukul 00.54

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/viewFile/7595/7153> diakses pada 23 Juni 2017 22.04